

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Daerah

a. Tabel IPH Kabupaten Pesisir Barat Selama Triwulan I 2026 sebagaimana diupdate oleh BPS:

Minggu Ke	Januari	Februari	Maret
1	-0,46%	1,54%	-1,32%
2	-1,41%	1,60%	-1,14%
3	-1,90%	1,76%	
4	-1,91%	1,59%	

b. 3 Komoditas Andil Penyumbang IPH terbesar Kabupaten Pesisir Barat Selama Triwulan I 2026 sebagaimana diupdate oleh BPS adalah sebagai berikut

Minggu Ke	Januari	Februari	Maret
1		Cabai Rawit (0,72%), Daging Sapi (0,45%), Minyak Goreng (0,23%)	Daging Sapi (-0,58%), Cabai Merah (-0,47%), Cabai Rawit (-0,21%)
2	Cabai Merah (-1,04%), Bawang Merah (-0,38%), Cabai Rawit (-0,10%)	Cabai Rawit (0,75%), Daging Sapi (0,46%), Bawang Putih (0,19%)	Daging Sapi (-0,58%), Cabai Merah (-0,48%), Bawang Putih (-0,12%)
3	Cabai Merah (-1,20%), Cabai Rawit (-0,43%), Bawang Merah (-0,38%)	Cabai Rawit (0,84%), Daging Sapi (0,46%), Bawang Putih (0,21%)	
4	Cabai Merah (-1,27%), Cabai Rawit (-0,55%), Bawang Merah (-0,41%)	Cabai Rawit (0,82%), Daging Sapi (0,23%), Bawang Putih (0,23%)	

c. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting selama Triwulan I di Kabupaten Pesisir Barat

Pada Triwulan I 2026 di Kabupaten Pesisir Barat mayoritas fluktuasi harga terjadi pada komoditas Hortikultura yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi cuaca, biaya transportasi, ketergantungan pasokan dari daerah lain, serta kenaikan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Komoditas hortikultura yang memiliki perubahan harga yang cukup fluktuatif yaitu Cabai Merah Besar dan Cabai Rawit Merah sedangkan beberapa komoditas lain yang ikut menyumbang perubahan harga adalah Bawang Merah dan Bawang Putih serta Cabai Rawit Keriting sebagaimana tercermin dari komoditas andil IPH.

Selain daripada harga-harga komoditas hortikultura, minyakita juga mengalami kenaikan harga pada kisaran Rp. 17.000 hingga Rp. 19.000 pada tingkat pengecer dan berada di atas HET 15.700. Hal ini dikarenakan rantai distribusi yang cukup panjang untuk mencapai pedagang akhir. Adapun minyakita yang memiliki harga terendah adalah minyakita yang dijual melalui Rumah Pangan Kita dan Operasi Pasar ataupun Gerakan Pangan Murah memiliki harga Rp. 15.500/liter yang diperoleh melalui koordinasi dengan Perum BULOG.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat selama Triwulan I yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Komoditas Hortikultura Strategis masih bergantung dengan pasokan luar daerah
2. Rantai distribusi bahan pokok yang cukup panjang hingga tingkat pengecer membuat harga beberapa bahan pokok melonjak cukup tinggi dari HET/HAP seperti pada kasus minyakita
3. Kenaikan biaya distribusi ikut memengaruhi harga serta potensi terjadinya kelangkaan bahan bakar bisa membuat kendala dalam distribusi bahan pokok penting
4. Peningkatan harga pada telur ayam dikarenakan meningkatnya harga pakan, produksi pakan dalam daerah tidak mencukupi karena hanya rata-rata 1,5 ton/bulan sedangkan kebutuhan 90 ton/bulan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama Triwulan I 2026 di Kabupaten Pesisir Barat telah dilaksanakan Gerakan Pangan Murah pada tanggal 2 Maret 2026 di lokasi Lapangan Depan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Pesisir Barat, Kecamatan Pesisir Tengah. Adapun Hasil/Capaian dari kegiatan tersebut antaralain:

1. Komoditas Beras Medium/SPHP: Volume 3 Ton Terjual 3 Ton;
2. Gula Pasir: Volume 250 Kg Terjual 250 Kg
3. Minyak Goreng: Volume 1.200 Liter Terjual 1.200 liter
4. Tepung Terigu: Volume 100 Kg Terjual 100 Kg
5. Telur Ayam Ras: Volume 300 Karpet Terjual 300 Karpet
6. Bawang Merah: Volume 50 Kg Terjual 50 Kg
7. Bawang Putih: Volume 50 Kg Terjual 50 Kg
8. Cabai Merah: Volume 50 Kg Terjual 50 Kg

9. Cabai Rawit: Volume 30 Kg Terjual 30 Kg

10. Aneka Sayuran: Volume 100 Paket Terjual 100 Paket

Realisasi GPM 2 Maret 2026: 100%

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama Triwulan I 2026 TPID Kabupaten Pesisir Barat telah berupaya melakukan pengendalian inflasi lewat Gerakan Pangan Murah, Pemantauan Harga Intensif, serta berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi luar daerah seperti BULOG, BPS dan Bank Indonesia untuk mendapatkan dukungan pada kegiatan-kegiatan pengendalian inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi Kebijakan Pengendalian inflasi di daerah berdasarkan hasil analisis kinerja TPID Kabupaten Pesisir Barat selama Triwulan I 2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat fungsi koordinasi antar instansi melalui penguatan TPID Kabupaten Pesisir Barat untuk memastikan fungsi Pengendalian Inflasi di daerah berjalan lebih optimal
2. Kegiatan stabilisasi harga baik melalui operasi pasar murah dan gerakan pangan murah dilaksanakan berbasis data dan terencana sehingga tepat sasaran dalam meredam gejolak harga jangka pendek
3. Antisipasi HBKN dalam setiap triwulan untuk mempersiapkan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya fluktuasi harga bahan pokok/penting yang tidak terkendali
4. Menemukan solusi jangka panjang untuk permasalahan komoditas hortikultura yang fluktuatif baik melalui gerakan menanam yang efektif ataupun menambah volume pasokan luar daerah melalui kerjasama antar daerah
5. Menangani masalah rantai distribusi yang cukup panjang untuk mendatangkan harga barang yang lebih murah ke dalam daerah baik melalui subsidi barang pada pasokan daerah untuk dijual dengan harga murah di tingkat pengecer.